

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anharudin, 2016, *Sanksi Dalam Pembangunan Transmigrasi*, PT. Sulaksana Watinsa Indonesia, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman. Transmigrasi. 2015. *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan*, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2016, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fitriyah, Farida, 2016, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*, Setara Press, Malang.
- Gillin, J.L dan Gillin, J.P., 2008, *Cultural Sociology*, The mc Millian co. New York.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardjosoedarmo, Soedigdo, 1965, *Kebijaksanaan Transmigrasi dalam rangka pembangunan masyarakat desa di Indonesia*, Bhatara, Jakarta.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ishaq, H, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ismail, Nurhasan, 2018, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang.
- Mahkamah Agung RI, 2007, *Buku II: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Makarao, Moh. Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusuma, Sudikno, 2019, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Hukum Acara Perdata : Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta .
- _____, 2008, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Nurmansyah, Gunsu, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari, 2019, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, R, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sumardjono, Maria SW, 2019, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

_____, Nurhasan Ismail, Isharyanto, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sutopo, H.B., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Warsito, Rukmadi, Kustadi, Indriyati Eko Purwaningsih, Chodidah Budi Raharjo, S. Ismah Afwan, Sri Sumarni, Arief Budiman, Sujarwadi, 1984, *Transmigrasi: dari Daerah Asal sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/Reglement Indonesia yang Diperbaharui terjemahan K. Wantjik Saleh, SH.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, No.75, 1959).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050).

Peraturan Pemerintah 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
(Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497).

Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi No.3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran dan Keluarganya.

C. Karya Ilmiah

Irwan Haryo Wardani, 2016, “Perlindungan Hak Atas Penguasaan Tanah Transmigrasi Yang Di Telantarkan Dan Di Tinggalkan Oleh Transmigran Di Lahan Usaha II UPT Senaam IV Di Provinsi Aceh”, *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Jeffrey Sahuburua, 2007, “Sengketa Jual Beli Tanah Transmigrasi di Distrik Warmare Kabupaten Manokwari”, *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Novie Irianie, 2020, “Efektivitas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Transmigrasi Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Banjarmasin.

Setiono, 2004, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Zaitun, 2011 “Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara untuk Pelaksanaan Program Transmigrasi (Studi Kasus di Kabupaten Ogan Ilir)”, *Tesis* Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Ade Irma Junida, 2021, “BPS : Meski Lambat, ada pergeseran penduduk dari Jawa ke pulau lain”, website berita Antaranews

<https://www.antaranews.com/berita/1960368/bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-dari-jawa-ke-pulau-lain>, diakses pada 11 Mei 2021.

Prasetya, Pengadaan tanah dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Transmigrasi, <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Pengadaan-tanah-dan-Sertifikasi-Hak-Atas-anah-Untuk-transmigrasi-6906-id.html>, di akses 27 Mei 2021

Data sensus penduduk resmi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada website <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, diakses pada 22 November 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 04 April 2021

E. Jurnal

Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, Haryono, 2018, "Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)", *Jurnal Hermeneutika*, volume 04, nomor 01, 2018.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, 2016.

Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10, 1993.

Arie Sukanti Sumantri, "Perencanaan Pemukiman Transmigrasi Sebagai Usaha Pengembangan Wilayah Serta Masalah Hukum Dalam Penyediaan dan Penyiapan Tanahnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, volume 09, nomor 06, 1979.